

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Judul Skripsi**

Kebebasan Pers Indonesia

#### **B. Sub Judul Skripsi**

Analisis Isi Tajuk Rencana Mengenai Kasus Bank Century Dalam SKH Kompas dan SKH Solo Pos Periode November 2009-Maret 2010

#### **C. Latar Belakang**

Sudah lebih dari satu dasawarsa Indonesia lepas dari kungkungan pemerintahan yang otoriter, dimana semua kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan berpendapat dibatasi. Tentu saja hal ini membawa perubahan dan angin segar bagi kehidupan yang lebih demokratis di bangsa ini yang dapat dirasakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 28. Pada pasal itu disebutkan mengenai kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat di muka umum.

Selain masyarakat, perubahan ini pada akhirnya juga berpengaruh terhadap beberapa sektor kehidupan, dan salah satunya tentu saja dirasakan oleh dunia pers di Indonesia. Seperti yang telah diketahui selama ini, bahwa di jaman orde baru, kehidupan pers di Negara Indonesia seolah terkungkung dalam berbagai bentuk batasan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di jaman itu. Pers, dalam hal ini surat kabar harian, secara tidak langsung tidak dapat menjalankan fungsinya, yaitu sebagai anjing pengawas (*watchdog*) atau sebagai pengontrol

kinerja pemerintah. Selain itu, surat kabar harian di Indonesia pada masa itu kurang dapat memberikan masukan ataupun kritikan yang jelas dan tajam terhadap kinerja pemerintah di jaman itu. Kalaupun ada, itu hanya beberapa, dan pada akhirnya media itu akan dibredel, seperti kasus Tempo dan Detik.

Hal tersebut di atas merupakan sebuah bayangan dan gambaran kehidupan pers di jaman orde baru, dan tentu saja semua itu berbeda dengan kehidupan di jaman sekarang ini. Setelah tumbangnya orde baru, kehidupan pers Indonesia bertransformasi menjadi salah satu sektor yang diberikan kebebasan. Apalagi, tidak lama setelah orde baru tumbang, pemerintahan di era reformasi ini telah ditetapkan UU No. 40 tahun 1999, yang berisikan mengenai jaminan kebebasan bagi pers untuk berpendapat, dimana pada pasal 4 ayat 1 tertulis bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Tentu saja, dengan adanya UU ini, pers diharapkan dapat lebih kritis dan tegas dalam mengawal pemerintahan, agar dapat berjalan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sikap kritis dan tegas pers dapat dilihat dari editorial pemberitaannya atau yang masyarakat lebih biasa mengenal dengan nama tajuk rencana (*editorial content*).

Tajuk rencana adalah salah satu bentuk opini yang lazim ditemukan dalam surat kabar, majalah, atau tabloid. Secara teknik jurnalistik, menurut Haris Sumadiria, tajuk rencana dapat diartikan sebagai opini yang berisi aspirasi, pendapat, dan sikap resmi suatu media pers terhadap persoalan potensial, fenomenal, aktual, dan atau kontroversial yang terjadi di dalam masyarakat. Karakter dan kepribadian pers tercermin dalam tajuk rencana. Oleh karena itu

tajuk rencana sering disebut sebagai mahkota media pers, dimana dalam tajuk rencana atau editorial merepresentasikan semua visi, misi, filosofi, dan juga kebijakan umum suatu penerbitan media pers (Sumadiria, 2004; 81).

Keberadaan tajuk rencana secara tidak langsung akan diketahui mengenai sikap dan pemikiran yang dimiliki oleh sebuah media. Hal ini secara tidak langsung akan mengetahui independensi yang dimiliki oleh media tersebut dalam berpendapat. Hal ini pun sesuai apa yang dikatakan oleh Nam, yaitu tajuk rencana merupakan indikator kebebasan pers. Nam adalah peneliti yang melakukan penelitian tentang kebebasan pers di Asia, yaitu di Korea Selatan, Taiwan, dan Filipina pada tahun 1971 (Flournoy, 1992:124).

Nam sendiri berasumsi bahwa indikator dari kebebasan pers dapat dilihat dari bentuk tajuk rencana, apakah tajuk rencana tersebut berbentuk kritik atau tidak. Dengan kata lain adalah melihat komentar, opini, ataupun kritik yang diberikan oleh sebuah media massa terhadap kinerja pemerintahan melalui tajuk rencananya (Flournoy, 1992:124)

Penelitian ini sendiri akan difokuskan mengenai tajuk rencana yang membahas mengenai kasus Bank Century. Seperti dalam pemberitaan beberapa media massa elektronik dan cetak, kasus bank Century ini sangat erat berhubungan dengan pemerintahan yang ada. Bahkan kasus ini juga melibatkan wakil presiden terpilih 2009-2014, Boediono, dan menteri keuangan, Sri Mulyani, dalam kebijakannya yang berhubungan dengan pemberian dana talangan kepada bank Century. Selain itu juga mengemukakan opini yang dikeluarkan oleh A Tony Prasetyantono pada opini yang dibuat dan dibukukan oleh penerbit Kompas, bahwa *danabail out* yang

dikeluarkan telah disalah gunakan dan dimanfaatkan untuk biaya kampanye politik oleh salah satu calon. Hal ini, menurut Tony, dilihat dari sisi waktu ketika dana *bail out* dikucurkan pada 21 November 2008, para politisi memang sedang sibuk mempersiapkan pemilu legislative dan pemilu presiden. Dan menurutnya, kecurigaan ini sangat masuk akal (Kompas, 2010:166).

Dengan pengambilan fokus penelitian terhadap kasus tersebut, akan tampak apakah pemikiran dalam sebuah surat kabar, dalam hal ini dilihat dari tajuk rencananya, masih terkekang dan terbatas. Hal ini juga menjadi sebuah bentuk contoh nyata apakah suatu surat kabar dapat menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kinerja pemerintah (*watchdog*).

Media massa yang akan diteliti adalah Kompas dan Solo Pos. Alasan pemilihan kedua media tersebut adalah untuk melihat apakah di dalam media lokal (Solo Pos) dengan media nasional (Kompas) terdapat perbedaan sikap di dalam tajuk rencananya. Kompas sebagai salah satu surat kabar yang memiliki jangkauan pasar yang lebih luas tentu akan memiliki sikap yang berbeda dengan Solo Pos yang jangkauan pasarnya lebih terbatas. Tentu saja, secara tidak langsung, penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan sikap surat kabar nasional dengan surat kabar daerah.

Selain berdasarkan dari penelitian Nam, penelitian ini pun sebenarnya berangkat dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Abdul Razak (Flournoy, 1992 : 122), bahwa pada surat kabar di Indonesia pada tahun 1982 telah gagal mengkritisi kinerja pemerintah. Hal ini pun pada akhirnya membuktikan bahwa di jaman orde baru pers telah gagal sebagai pilar keempat

(pengontrol kinerja pemerintah) dalam tatanan pemerintahan dikarenakan tidak adanya kebebasan dan jaminan perlindungan terhadap pers di jaman itu.

Hal yang tidak berbeda jauh juga terlihat dari data dikemukakan Kompas pada 2 Juni 2010, bahwa kebebasan pers di Indonesia sejak tahun 2002 semakin menurun. Walaupun sempat menduduki peringkat ke-57 dunia di tahun 2002, tetapi pada tahun-tahun berikutnya semakin menurun, dan tercatat pada tahun 2009, Indonesia menduduki peringkat ke 100 dalam hubungannya mengenai kebebasan pers. Hal ini tentu saja menjadi sebuah sinyal negatif bagi keberadaan pers di Indonesia.

Pemahaman di atas tentu sangat menarik jika peneliti lebih jauh mendalami tajuk rencana mengenai kasus Bank Century yang hingga Maret 2010 masih berlarut-larut, terlebih kasus tersebut menyeret pemerintah secara langsung. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang ada di benak peneliti.

#### **D. Rumusan Masalah**

Bagaimana kebebasan pers di Indonesia dilihat dalam isi tajuk rencana mengenai kasus bank Century dalam SKH Kompas dan SKH Solo Pos periode November 2009-Maret 2010?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebebasan pers di Indonesia dilihat dalam isi tajuk rencana mengenai kasus bank Century dalam SKH Kompas dan SKH Solo Pos periode November 2009-Maret 2010.

## **F. Kerangka Teori**

### **Pers**

Tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan rasa ingin tahu manusia akan informasi melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Tetapi tugas dan fungsi pers yang bertanggung jawab tidaklah hanya sekedar itu, melainkan lebih dalam lagi, yaitu mengamankan hak-hak warga Negara. Oleh karena itu, menurut Hikmat dan Purnama (Kusumaningrat, 2005 ; 27), ada beberapa fungsi pers, yaitu fungsi informatif, kontrol, interpretatif dan direktif, menghibur, regeneratif, pengawalan hak-hak warga negara, ekonomi, dan swadaya.

Apa yang ditulis oleh Hikmat dan Purnama, tidak berbeda jauh dengan apa yang tertulis di dalam UU No 40 tahun 1999 pasal 3 ayat 1, dimana dalam pasal itu, pers memiliki empat fungsi utama, yaitu sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, dan kontrol sosial.

Pertama fungsi pers sebagai media informasi, yaitu pers berkewajiban untuk memberikan informasi atau berita yang penting dan berguna kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur. Kedua, fungsi pers sebagai media pendidikan, yaitu pers memberikan nilai-nilai edukasi terhadap khalayak. Ketiga, pers sebagai media untuk menghibur, yaitu apa yang disampaikan oleh sebuah media massa kadang tidak hanya berita-berita yang bersifat mendidik saja. Kadang apa yang mereka tulis dalam sebuah media massa merupakan kisah lucu, walaupun itu tidak penting, kepada khalayak. Tetapi hal ini kadang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana hiburan.

Keempat, pers memiliki fungsi sebagai kontrol sosial. Fungsi ini merupakan fungsi yang sangat ditekankan oleh penulis dalam penelitiannya. Fungsi kontrol, dalam hal ini, pers menjadi anjing pengawas terhadap setiap kebijakan ataupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pers menjadi sebuah media yang mempunyai peranan penting dalam mengawal kinerja pemerintah demi tercapainya kehidupan negara yang sesuai dengan cita-cita bangsa (Kusumaningrat, 2005 :27). Hanya pers yang memiliki independensi diri yang kuat saja yang dapat secara jelas menjalankan fungsi ini.

Seperti yang telah diketahui, semasa jaman Orde Baru, pers Indonesia terkekang oleh adanya berbagai aturan yang membatasi ruang gerak pers itu sendiri. Menurut Satrio Arismunandar, pada buku *Pers dalam "Revolusi Mei"* terbitan tahun 2000, pada jaman Orde Baru, walaupun terdapat kemitraan (*partnership*) antara pemerintah dengan pers, faktanya tetap pemerintahlah yang lebih kuat dan dominan, sehingga dalam pola hubungan semacam ini, fungsi kontrol pers terhadap pemerintah praktis sangat lemah. Selain itu, pemerintah pun menjadi berlebihan ketika melihat adanya perbedaan sikap dan pandangan antara pemerintah sendiri dengan pers. Hal itu terlihat dengan diterbitkannya peraturan mengenai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Dampak dari keberadaan SIUPP ini, pers Indonesia pada masa Orde Baru lebih banyak mengembangkan gaya pemberitaan yang berbentuk kritik tak langsung dan menghindari gaya bahasa yang lugas agar tidak dicabutnya SIUPP oleh Departemen Penerangan.

Departemen Penerangan waktu itu menjadi momok bagi kebebasan pers. Hal itu terlihat dengan dibredelnya 11 surat kabar di Indonesia terkait kasus Malari

pada tahun 1974. Tidak hanya itu saja, pada tahun 1978 tujuh surat kabar juga dibredel, dan salah satunya Kompas. Bahkan Pemimpin Redaksi Kompas pada waktu itu, yaitu Jakob Oetama bersama pemimpin redaksi dari surat kabar yang dibredel tersebut secara bersama-sama mengirim surat minta maaf kepada Presiden Soeharto (Kompas, 2000: 207). Tentu saja hal ini menunjukkan rendahnya kebebasan pers di Indonesia. Tetapi ketika pada masa pemerintahan Gus Dur, beliau dengan langkah berani membubarkan Departemen Penerangan dikarenakan fungsi penerangan bukanlah merupakan monopoli pemerintah (Gamedia, 2000 : 206). Tentu saja hal ini menjadi sebuah angin segar bagi kebebasan pers di Indonesia.

Pers yang independen atau bebas merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat, bernegara, dan berbangsa yang demokratis. Menurut UU No 40 tahun 1999, kebebasan pers merupakan kondisi dimana pers dapat menjalankan fungsinya tanpa ada paksaan ataupun campur tangan dari pihak lain. Selain itu, pers juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapat jaminan. Sedangkan menurut Abdul Razak, kebebasan pers adalah kondisi atau tingkatan dimana pers dapat memberikan komentar secara bebas terhadap proses politik yang sedang berlangsung (Flournoy, 1992 : 122).

Hal di atas tersebut tidak begitu jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh J. Anto dalam opininya dalam buku yang berjudul *Potret Pers Indonesia 2005* yang diterbitkan oleh Dewan Pers. Menurut dia, kebebasan pers dapat dilihat menggunakan dua asas. Pertama, kebebasan masyarakat untuk mendapat



informasi publik dan menyatakan pendapat. Kedua, kebebasan pers untuk mencari dan menyampaikan informasi serta pendapat kepada publik. Jadi, menyampaikan pendapat merupakan salah satu indikator dari adanya kebebasan pers. Dengan pengertian ini, apa yang disampaikan oleh pers atau media massa seharusnya merupakan pikiran, pandangan, ataupun opini dari pihak pers itu sendiri ketika melihat adanya fakta di lapangan.

Kebebasan pers dapat terlihat dari arah dan isi dari pemberitaannya. Selain itu, keberadaan tajuk rencana juga dapat menjadi tolak ukur dari independensi pers (media massa cetak atau surat kabar). Setiap media massa cetak secara umum tentu saja memiliki apa yang dinamakan tajuk rencana atau juga dikenal dengan istilah *editorial*. Jadi secara tidak langsung, dalam sebuah tajuk rencana, dapat dilihat tingkat kebebasan suatu surat kabar dalam berpendapat, mengkritik, ataupun berargumentasi. Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Don Michel Flournoy mengutip tulisan Nam bahwa tajuk rencana adalah tempat yang logis untuk mencari kritik terhadap presiden, kabinet, dan pemimpin-pemimpin lain (Flournoy, 1992:124).

Tajuk rencana adalah salah satu bentuk opini yang lazim ditemukan dalam surat kabar, majalah, atau tabloid. Secara teknik jurnalistik, menurut Haris Sumadiria, tajuk rencana dapat diartikan sebagai opini yang berisi aspirasi, pendapat, dan sikap resmi suatu media pers terhadap persoalan potensial, fenomenal, aktual, dan atau kontroversial yang terjadi di dalam masyarakat (Sumadiria, 2004 : 82). Karakter dan kepribadian pers tercermin dalam tajuk rencana. Oleh karena itu tajuk rencana sering disebut sebagai mahkota media pers,

dimana dalam tajuk rencana atau editorial merepresentasikan semua visi, misi, filosofi, dan juga kebijakan umum suatu penerbitan media pers. Berdasarkan hal itulah, mengapa penulis memilih tajuk rencana sebagai indikator dalam melihat kebebasan suatu media massa dalam melihat suatu fakta ataupun peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Rizal Mallarangeng berpendapat bahwa terdapat tiga model tajuk rencana, yaitu Model Jalan Tengah (MJT), Model Angin Surga (MAS), dan Model Anjing Penjaga (MAP) (Wijayanti, 2004 : 46).

Model Jalan Tengah (MJT), pada dasarnya ditulis untuk melancarkan gugatan secara langsung dan terbuka terhadap suatu kecenderungan ataupun kebijakan. Walau kritis dalam setiap penulisannya, tajuk MJT terkesan terlalu santun, berputar-putar, dan cenderung mengaburkan pesan yang hendak disampaikan, sehingga tajuk model ini terkesan ingin menghindari konfrontasi langsung dengan pihak yang diulas atau yang dikritiknya. Ciri khas dari model ini adalah unsur yang menimbang-nimbang, dan bahkan apa yang telah ditegaskan sebelumnya bisa berbeda atau bahkan sering bertentangan dengan penegasan semula di isi tajuknya.

Model yang kedua adalah Model Angin Surga (MAS). Pada model ini, walau hampir serupa dengan MJT, tetapi terdapat perbedaan mendasar, yaitu pada tajuk MAS ditujukan bukan untuk menggugat atau mempertanyakan suatu hal tertentu. Di dalam isi tajuk ini, lebih banyak berisikan suatu imbauan dan juga harapan. Model ketiga, yang juga merupakan model terakhir, yaitu Model Anjing Penjaga (MAP). Pada model ini lebih mencerminkan perubahan zaman dan memanfaatkan sepuh-penunya udara kebebasan yang sekarang mulai dinikmati.

Di dalam tajuk model ini, bisa terlihat dengan jelas apa yang diperjuangkan dan apa yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Ciri khas dari tajuk model ini adalah lugas, berani, dan tajam dalam setiap kritiknya di isi tajuk tersebut. Kritik itu bahkan bisa ditujukan kepada pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yaitu kepala pemerintahan. Tajuk seperti inilah yang benar-benar menjalankan kodratnya sebagai media yang mampu menjadi lembaga kontrol di suatu negara dalam mengawasi jalannya suatu pemerintahan (Wijayanti, 2004:46).

Selain itu, menurut William Pinkerton (Santana, 2005 : 69), tajuk rencana memiliki beberapa fungsi. Fungsi tajuk rencana antara lain menjelaskan berita (*explaining news*), menjelaskan latar belakang (*filling in background*), meramalkan masa depan (*forecasting the future*), dan menyampaikan pertimbangan (*passing moral judgements*).

1. Menjelaskan berita (*explaining the news*), yaitu tajuk rencana menjelaskan kejadian-kejadian penting kepada para pembaca. Tajuk rencana berfungsi sebagai guru, menerangkan bagaimana suatu kejadian tertentu berlangsung, faktor-faktor apa yang diperhitungkan untuk menghasilkan perubahan dalam kebijakan pemerintah, dengan cara bagaimana kebijakan baru akan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi suatu masyarakat.
2. Menjelaskan latar belakang (*filling in background*), yaitu untuk memperlihatkan kelanjutan suatu peristiwa penting, tajuk rencana dapat menggambarkan kejadian tersebut dengan latar belakang sejarah, yaitu menghubungkannya dengan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Dengan menganalisis sejarah sekarang, tajuk rencana dapat memperlihatkan keterkaitannya dengan masalah-masalah umum sekarang. Tajuk rencana dapat menunjukkan hubungan antara berbagai peristiwa terpisah : politik, ekonomi, atau sosial. Kadang-kadang tajuk rencana memuat suatu pandangan dan menunjukkan kesamaan dengan sejarah, yaitu kesamaan yang bertujuan untuk mendidik masyarakat.
3. Meramalkan masa depan (*forecasting the future*), yaitu suatu tajuk rencana kadang-kadang menyajikan analisis yang melewati batas berbagai peristiwa sekarang dengan tujuan meramalkan sesuatu yang akan terjadi pada masa datang.
4. Menyampaikan pertimbangan moral (*passing moral judgment*), yaitu para penulis tajuk rencana bertugas mempertahankan kata hati masyarakat.

Mereka diharapkan mempertahankan isu-isu moral dan mempertahankan posisi mereka.

Selain memiliki fungsi, tajuk rencana juga memiliki beberapa jenis. Menurut Assegaff dalam buku karya Sumadiria yang berjudul *Menulis Artikel dan Tajuk Rencana* (Sumadiria, 2004 : 84), jenis-jenis tajuk rencana, yaitu tajuk rencana yang bersifat memberikan informasi semata, tajuk rencana yang bersifat menjelaskan, tajuk rencana yang bersifat memberikan argumentasi, tajuk rencana yang bersifat menjuruskan timbulnya aksi, tajuk rencana yang bersifat jihad, tajuk rencana yang bersifat membujuk, tajuk rencana yang bersifat memuji, dan tajuk rencana yang bersifat menghibur.

Selain itu, menurut Krieghbaum, tajuk rencana juga memiliki beberapa bentuk (Wijayanti, 2004 : 14), yaitu :

**1. Argumentatif**

Tajuk rencana ini membela suatu pandangan tertentu, dan mengajak pembaca untuk berpikir dan bersikap kritis terhadap sesuatu permasalahan. Tajuk rencana argumentatif dibuat untuk membahas dan menganalisa baik buruknya suatu dampak atau pengamalan suatu kebijakan atau kegiatan. Argumen-argumen yang diajukan melalui tajuk rencana bisa berupa imbauan jelas untuk bertindak atau isyarat untuk menggiring pembaca ke arah jalan pikiran yang dikehendaki oleh sang redaktur.

**2. Informatif**

Tajuk ini merupakan usaha sang redaktur untuk memberikan kepada para pembacanya keterangan-keterangan, latar belakang tentang suatu hal atau masalah tertentu.

**3. Miscellaneous**

Jenis tajuk ini, dinamakan juga tajuk bersifat interpretasi, penjelasan, atau penggelaran. Teknik penulisan ini digunakan untuk melancarkan proses pembentukan pendapat pembaca. Dalam tajuk ini redaktur membantu pembaca untuk memahami kompleksitas berita yang disajikan tanpa berusaha untuk memaksakan kesimpulan, prasangka atau pendapatnya kepada para pembaca.

Dari pemahaman teori di atas, indikasi mengenai kebebasan suatu surat kabar dapat terlihat dari kriteria mengenai jenis, fungsi, dan bentuk dari suatu tajuk

rencana tersebut. Pers dapat dikatakan memiliki tingkatan kebebasan yang tinggi apabila tajuk rencana tersebut cenderung mengkritik dan berargumentasi (Flournoy, 1992 : 128).

Selain mengukur jenis, fungsi, dan bentuk tajuk rencana, penelitian ini juga mengklasifikasikan kecenderungan suatu surat kabar dalam menyampaikan suatu opini. Menurut Harold D. Lasswell (Flournoy, 1992 : 129), kecenderungan dikategorikan kedalam 3 kategori, yaitu : *favorable*, *unfavorable*, dan *neutral*.

Pertama, tajuk rencana dikategorikan kedalam kategori *favorable* (mendukung) apabila dalam tajuk rencana tersebut menunjukkan kekuatan moralitas ataupun aktivitas pemerintah yang positif, yaitu dalam hal ini mendukung pemerintah dalam pemberian dana talangan kepada Bank Century. Kedua, kategori *unfavorable* (tidak mendukung), yaitu apabila dalam tajuk rencana tersebut menunjukkan kelemahan moralitas ataupun aktivitas negatif dari pemerintah, yaitu memandang pemberian dana talangan kepada bank Century oleh pemerintah, seharusnya tidak dilakukan.

Selanjutnya kategori ketiga menurut Lasswell adalah *neutral*, yaitu apabila dalam tajuk rencana tersebut tidak menunjukkan indikasi kelemahan ataupun kekuatan dari pemerintah. Jadi menurut pemahaman kecenderungan di atas, media massa atau surat kabar yang memiliki kecenderungan ke arah *unfavorable* , mengindikasikan bahwa surat kabar tersebut memiliki tingkatan kebebasan yang lebih tinggi.

Pengukuran tingkat kebebasan dari surat kabar juga melalui klasifikasi faktor evaluasi dari Nord, yaitu apakah tajuk rencana tersebut memuji atau menyalahkan

pemerintah dalam arahan topik politik (Flournoy, 1992 : 129). Pengukuran ini akan terlihat mengenai bagaimana pandangan dan sikap sebuah surat kabar terhadap kasus bank Century, apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian dana talangan kepada bank Century sudah benar dan sesuai dengan UU ataukah kebijakan itu merupakan sebuah bentuk tindak kesalahan pemerintah yang pada akhirnya berujung pada tindak pidana perbankan dan terindikasi adanya tindak korupsi.

### **G. Kerangka Konsep**

Nam berasumsi bahwa indikasi dari kebebasan pers adalah sebuah pendapat ataupun komentar yang berbentuk kritik terhadap performa dari pemerintah, dan tajuk rencana adalah tempat logis untuk mencari kritik terhadap setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (Flournoy, 1992 : 124). Dari pemahaman itu, kebebasan pers sebuah surat kabar akan terlihat apabila tajuk rencana tersebut lebih cenderung kebentuk agumentatif, *unfavorable*, menyalahkan atau dalam hal ini mengkritik ataupun menghukum performa pemerintah yang dinilai kurang positif, dan juga tajuk rencana tersebut meneruskan suatu penilaian moral terhadap kinerja pemerintah, yang dalam hal ini mengenai kebijakan pemberian dana talangan kepada bank Century. Selain itu, untuk mengukur kebebasan pers melalui tajuk rencana, juga dapat dilihat dari model tajuk rencana itu dibuat. Tajuk rencana yang memberikan gambaran bahwa kebebasan pers itu ada terlihat dari tajuk rencana yang memiliki model anjing penjaga (MAP).

Unit Analisis	Kategorisasi
Fungsi Tajuk Rencana	a. Menjelaskan berita b. Mengisi latar belakang c. Meramalkan masa depan d. Meneruskan suatu penilaian moral
Bentuk Tajuk Rencana menurut Krieghbaum	a. Agumentatif b. informatif c. miscellaneous
Kategori Kecenderungan menurut Lasswel	a. <i>favorable</i> b. <i>unfavorable</i> c. <i>neutral</i>
Faktor Evaluasi Nord	a. memuji b. menyalahkan/ menghukum

## H. Definisi Operasional

1. Fungsi tajuk rencana (Santana, 2005 : 69) :

### a) Menjelaskan berita

Isi tajuk ini menjelaskan mengenai kasus bank Century, isu seputar kasus Century, dan apa akibatnya kepada masyarakat dan negara. Jadi dalam tajuk ini, hanya memberikan dan memaparkan dampak dari kasus bank Century saja tanpa memberikan suatu pesan apapun.

**b) Mengisi latar belakang**

Tajuk rencana ini memberikan kaitan berita mengenai kasus Century dengan kenyataan-kenyataan sosial lainnya. Penulis tajuk rencana melengkapi berita mengenai kasus Century dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Jadi dalam tajuk ini, hanya memaparkan penyebab adanya kasus bank Century yang dapat dilihat dari beberapa aspek, tanpa memberikan penilaian tegas apapun terhadap kasus ini.

**c) Meramalkan masa depan**

Tajuk rencana ini memberikan ramalan apa yang akan terjadi dalam kasus Century dan mengajak pembaca untuk berjaga-jaga atau memanfaatkan sesuatu dimasa depan

**d) Meneruskan suatu penilaian moral**

Tajuk rencana memberikan penilaian dan sikapnya atas sesuatu kejadian dalam kasus yang berkaitan dengan Century. Dalam tajuk ini, penulis tajuk berusaha untuk memberikan dan memaparkan pandangannya mengenai soal kasus bank Century dan berani untuk menilai mengenai keberadaan kasus tersebut.

2. Bentuk Tajuk Rencana menurut Krieghbaum (Wijayanti, 2004 : 14) :

**a) Argumentatif**

Tajuk ini memiliki kecenderungan mengadvokasi beberapa hal. Tajuk ini mengkonstruksikan diskusi dan analisis pengaruh baik dan buruk atau aplikasi dari kebijakan di dalam kasus Century ataupun aktivitas dalam



kasus Century. Argumentasi dimunculkan untuk sebuah tindakan atau menggiring pembaca untuk memikirkan kembali apa yang tertulis didalam tajuk.

**b) Informatif**

Tajuk ini menyediakan pembaca beragam informasi mengenai kasus Century atau dengan topik tertentu yang berhubungan dengan kasus Century. Tajuk ini memfasilitasi pembaca dalam membentuk opini. Tajuk semacam ini tidak memberikan argumentasi kuat terhadap hal-hal tertentu.

**c) *Miscellaneous* (Bermacam-macam)**

Tajuk ini sekedar mencari kesenangan dan hiburan bagi pembacanya daripada menyediakan interpretasi terhadap segala aktivitas yang berhubungan dengan kasus Century atau apapun yang mempersuaskannya. Tajuk yang tidak termasuk dalam bentuk argumentatif ataupun informatif, digolongkan pula kedalam kelompok ini.

3. Kategori Kecenderungan menurut Harold D. Lasswell (Flournoy, 1992 : 129) :

**a) *Favorable***

Sebuah tajuk dinyatakan *favorable* atau mendukung jika menunjukkan kekuatan moralitas, atau aktivitas pemerintah yang positif. Dalam hal ini, tajuk memiliki kecenderungan mendukung suatu kebijakan atau kepentingan dengan memberikan pernyataan positif dari kekuatan, moralitas, ataupun aktivitas pemerintah dalam kaitannya dengan kasus Century. Pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif beserta jajarannya dan juga partai politik pendukung pemerintah.

**b) *Unfavorable***

Sebuah tajuk dinyatakan *unfavorable* atau tidak mendukung jika menunjukkan kelemahan, moralitas, atau aktivitas pemerintah yang negatif. Dalam moralitas ditunjukkan misalnya korupsi, kebohongan, dan sebagainya. Sedangkan dalam aktivitas misalnya kemalasan ataupun pencitraan diri dari pemerintah. Tajuk ini memiliki kecenderungan tidak mendukung kebijakan atau kepentingan dengan memberikan pernyataan yang negatif dari moralitas ataupun aktivitas dari pemerintah maupun parpol pendukung pemerintah dalam kaitannya dengan kasus bank Century.

**c) *Neutral***

Sebuah tajuk dinyatakan netral jika tidak menunjukkan indikasi kelemahan atau kekuatan dari pemerintah.

4. Faktor Evaluasi Nord (Flournoy, 1992 : 129) :

**a) *Memuji***

Pada kategori ini untuk melihat ketegasan media apakah memuji kinerja pemerintah dalam kasus bank Century, dimana kebijakan pemerintah dalam pemberian dana talangan sudah sesuai dengan UU dan untuk menyelamatkan perekonomian negara.

**b) *Menghukum/ Menyalahkan***

Melihat ketegasan media dalam menyikapi sebuah kasus. Dalam hal ini adalah apakah media tersebut menyalahkan dan mencela pemerintah atas

terjadinya kasus Century, dimana kebijakan pemerintah dalam pemberian dana talangan tidak sesuai dengan UU yang ada, dan merupakan kebijakan yang berujung pada tindak pidana perbankan dan juga tindak korupsi.

## **I. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Rachmat Kriyantono, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Penelitian kuantitatif berangkat dari konsep-konsep atau teori-teori yang melandasinya (Kriyantono, 2006:57). Dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan gambaran secara kuantitatif mengenai kebebasan pers di Indonesia melalui tajuk rencana dari 2 surat kabar yang berbeda, yaitu SKH Kompas dan SKH Solo Post. Maka dari itu, penulis menggunakan analisis isi sebagai metodenya. Menurut Krippendorff (1991:81), analisis isi merupakan teknik membuat inferensi-inferensi (kesimpulan) yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Sah data di sini dimaksudkan supaya penelitian dengan metode analisis isi menghasilkan hasil yang handal (*reliable*), terutama jika peneliti dalam waktu dan keadaan yang berbeda, melakukan penelitian terhadap data yang sama, dengan teknik yang sama pula, maka hasilnya harus sama. Selain itu, menurut Frey (Wijayanti, 2004:35) analisis isi memiliki tujuan untuk mendekripsikan karakteristik pesan yang ada dalam ranah publik dengan perantaraan teks yang ada di surat kabar.

Apa yang diutarakan oleh Frey, tidak begitu jauh berbeda dengan pemikiran Berelson dan Kerlinger mengenai analisis isi, yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, obyektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Kriyantono, 2006 : 228). Berdasarkan definisi di atas, Kriyantono menyimpulkan bahwa dalam analisis isi terdapat 4 prinsip utama, yaitu :

- a. Obyektif, maksudnya adalah hasil analisis tergantung pada prosedur riset bukan pada orangnya. Kategori yang sama bila digunakan untuk isi yang sama dengan prosedur yang sama, maka hasilnya harus sama, walaupun risetnya berbeda.
- b. Sistematis, maksudnya adalah ada perlakuan prosedur yang sama pada semua sisi yang dianalisis.
- c. Kuantitatif, maksudnya adalah mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan berbagai jenis isi yang didefinisikan.
- d. Manifest, yakni isi yang muncul apa adanya, bukan yang dirasa atau dinilai penulis sebagai peneliti.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Koran nasional yang ada di Indonesia, yaitu Surat Kabar Harian Kompas. Kompas adalah salah satu SKH terbesar di Indonesia, dan merupakan surat kabar harian yang sudah ada sejak jaman orde baru. Selain Kompas, subjek dalam penelitian ini juga ada Solo Pos, sebagai surat kabar harian daerah. Walaupun terhitung masih baru, surat kabar Solo Pos juga pernah merasakan kehidupan pers di jaman orde baru. Pada akhirnya, penelitian ini, juga bertujuan untuk melihat sikap dari surat kabar tersebut, sebagai surat kabar lokal dan nasional, dalam menanggapi kasus Century.

## 3. Obyek Penelitian

Obyek yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah tajuk rencana dari 2 surat kabar harian yang berbeda, yaitu Kompas dan Solo Pos, dan untuk edisi bulan November 2009 hingga Maret 2010. Pemilihan periode tersebut tentu mempunyai alasan, yaitu pada periode tersebut (November 2009) kasus Century mulai hangat dibicarakan dan pada Maret 2010, kasus Century diberikan ketetapan putusan oleh Pansus dari DPR.

#### 4. Populasi dan Sampel

Menurut Dr. Hamidi, populasi adalah keseluruhan satuan unit analisis yang akan diteliti (Hamidi, 2007 : 126). Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh tajuk rencana yang ditentukan atas periode tersebut, yaitu bulan November 2009-Maret 2010. Alasan memilih periode waktu tersebut, yaitu :

1. Mengetahui bagaimana isi dan sikap tajuk rencana Surat Kabar Harian Kompas dan Harian Solo Pos yang membicarakan tentang kasus Bank Century pada November 2009-Maret 2010.
2. Pada periode tersebut, kasus yang diteliti masih hangat diperbincangkan, dan pada bulan Maret, merupakan detik-detik penetapan keputusan dari sikap tim Pansus Bank Century.

Setelah menentukan populasi, maka tahap berikutnya adalah penentuan sampel dari tajuk rencana yang diteliti. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi, dan teknik yang digunakan adalah purposive sample, yaitu sampel yang berdasarkan pada tujuan tertentu. Dalam pemilihan sampel pada penelitian ini, digunakan total sampling, yaitu penelitian yang didasarkan pada hasil pemilihan sampel.

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan semua tajuk rencana pada bulan November 2009-Maret 2010. Lalu dilakukan pemilahan, dan dari hasil pemilahan tersebut, ditemukan sampel untuk penelitian, yaitu : terdapat total 42 tajuk rencana dari Kompas dan Solo Pos yang membahas mengenai kasus Bank Century, dan tajuk tersebut dijadikan sebagai sampel penelitian. Jadi, tidak semua tajuk rencana pada edisi November 2009- Maret 2010 dari kedua surat kabar tersebut dijadikan sampel penelitian. Hanya tajuk rencana yang membahas mengenai perkembangan kasus bank Century saja yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Dari 42 tajuk tersebut, 11 diantaranya berasal dari Solopos, dan 31 tajuk berasal dari Kompas.

Sebagai koran nasional, SKH Kompas tentu saja memiliki jumlah intensitas yang tinggi dalam membuat tajuk rencana yang berhubungan mengenai kasus Bank Century dibandingkan SKH Solopos yang merupakan koran daerah. Kasus Bank Century merupakan isu nasional, dan maka dari itu, Solopos melalui tajuknya jarang sekali membahas persoalan ini. SKH Solopos selama bulan November 2009-Maret 2010 juga lebih banyak membuat tajuk mengenai permasalahan daerah di mana Solopos berada, yaitu di sekitar kota Solo.

##### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sebuah prosedur dalam penelitian yang sangat menentukan baik tidaknya penelitian. Dalam sebuah penelitian, penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat dapat membantu pencapaian hasil (pemecahan masalah) yang sah (*valid*) dan *reliable* (Waskito ; 1992).

Untuk memperoleh data dan informasi penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data *intercoder* atau *coding sheet*, yaitu data yang berasal dari daftar pertanyaan yang dibuat yang disesuaikan dengan kategorisasi dari variabel penelitian.
- b. Studi pustaka, digunakan sebagai landasan teori yang tepat dalam penelitian dan sebagai arah dalam melaksanakan penelitian.
- c. Studi dokumentasi, suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempergunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen, seperti sampel tajuk rencana yang akan diteliti, yaitu tajuk rencana dari SKH Kompas dan tajuk rencana dari SKH Solo Pos.

#### 6. Uji Reliabilitas

Pengkodean dilakukan dengan 2 orang *intercoder* untuk membuktikan bahwa penelitian ini obyektif dan *reliable* (dapat dipercaya). Dalam melakukan *intercoder reliability* dapat dilakukan dengan menggunakan formula yang digunakan Holsti dalam bukunya Rachmat Kriyantono, "Teknis Praktis Riset Komunikasi". Dengan menggunakan data nominal dalam bentuk presentase pada tingkat persamaannya:

$$\text{Reliability: } \frac{2M}{N1+N2}$$

M : jumlah keputusan coding dimana semua coder sepakat

N1+N2 : jumlah keputusan coding yang dibuat oleh coder pertama dan kedua

Rumus di atas mendapat kritikan karena tidak memperhitungkan tingkat persetujuan intercoder karena peluang, maka setelahnya digunakan rumus Scott sebagai berikut:

$$P_i = \frac{\text{Persetujuan yang nyata} - \text{Persetujuan yang diterapkan}}{1 - \text{Persetujuan yang diharapkan}}$$

Pi adalah nilai keterandalan

Pada penelitian ini sendiri, didapatkan hasil CR yang semuanya memenuhi nilai minimum CR, yaitu di atas 0,6. Untuk penjabaran lebih jelas mengenai hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Bab III, sebagai bab analisa data.

#### 7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana peneliti ingin melihat kebebasan surat kabar harian dalam berpendapat melalui tajuk rencana dari Kompas dan Solo Pos periode November 2009- Maret 2010. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk membuat evaluasi dan membeikan kesimpulan. Selain itu juga dilakukan komparasi antara hasil olahan yang ditemukan di Kompas dengan hasil olahan data dari Solo Pos.